

PROFIL KEMISKINAN PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2020



PROFIL KEMISKINAN

PROVINSI DKI JAKARTA

TAHUN 2020



PROFIL KEMISKINAN DKI JAKARTA, 2020

No. ISBN	: 2714-9234
No. Publikasi	: 31000.2120
Katalog BPS	: 3205005.31
Ukuran Buku	: A5 (14,8cm x 21cm)
Jumlah Halaman	: xii + 73 halaman
Naskah	: BPS Provinsi DKI Jakarta
Penyunting	: BPS Provinsi DKI Jakarta
Desain kover oleh	: BPS Provinsi DKI Jakarta
Diterbitkan oleh	: © BPS Provinsi DKI Jakarta
Dicetak oleh	: BPS Provinsi DKI Jakarta
Sumber ilustrasi	: -

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengkomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta

KATA PENGANTAR

Profil Kemiskinan DKI Jakarta 2020 merupakan publikasi Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, berisi data tentang jumlah penduduk miskin, persentase penduduk miskin, karakteristik penduduk miskin, distribusi dan ketimpangan pendapatan di DKI Jakarta Tahun 2020. Data-data tersebut merupakan hasil pengolahan dari Survei Susenas Maret dan September 2020.

Publikasi ini menyajikan tabulasi dan grafik tingkat kemiskinan, distribusi dan ketimpangan pendapatan di DKI Jakarta serta tabulasi dan grafik karakteristik penduduk miskin di DKI Jakarta selama tahun 2019.

Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam pengolahan data dan penyusunan publikasi ini disampaikan terima kasih. Kritik dan saran sangat diharapkan untuk perbaikan publikasi ini.

Jakarta, Oktober 2021

BPS Provinsi DKI Jakarta
Kepala,



Buyung Airlangga

TIM PENYUSUN

Pengarah	: Buyung Airlangga
Penanggungjawab Teknis	: Suryana
Editor	: Suryana Rini Savitridina
Penulis	: Theresia Parwati
Pengolah Data	: Theresia Parwati Kadek Swarniati
<i>Layout</i> dan Infografis	: Theresia Parwati
Gambar Kulit	: Bidang

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	vi
Daftar Gambar	viii
1 Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan Penulisan	4
1.3 Ruang Lingkup dan Data yang digunakan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
2 Metodologi	6
2.1 Metode Penghitungan Kemiskinan	6
a. Konsep	6
b. Sumber data	6
c. Metode	6
d. Teknik Penghitungan Garis Kemiskinan	7
2.2 Indikator Kemiskinan	11
2.3 Distribusi dan Ketimpangan Pendapatan	13
3 Kemiskinan di Jakarta	22
3.1 Tingkat Kemiskinan DKI Jakarta, 2012-2019	22

3.2	Perkembangan Tingkat Kemiskinan, 2012-2019	24
3.3	Perkembangan Indeks Kedalaman dan Indeks Keparahan Kemiskinan	29
4	Distribusi dan Ketimpangan Pendapatan	32
4.1	Perkembangan Distribusi dan Ketimpangan Pendapatan	33
4.2	Kriteria Bank Dunia untuk Kemiskinan DKI Jakarta	35
5	Seberapa Dalam dan Parah Kemiskinan di Jakarta ...	38
5.1	Perkembangan Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan, 2017 - 2020	40
5.2	Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten/Kota di Jakarta, Maret 2017 – Maret 2020	43
5.3	Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten/Kota di Jakarta, Maret 2017 – Maret 2020	45
6	Faktor-faktor Kemiskinan Makro Kemiskinan di Jakarta.....	48
a.	<i>Nilai KMO and Bartlett's Test</i>	48
b.	<i>Anti Image Matrices</i>	49
c.	<i>Communalities</i>	51
d.	<i>Total Variance Explained</i>	53
e.	<i>Scree Plot</i>	55

<i>f. Tabel Component Matrix</i>	56
<i>g. Rotated Component Matrix</i>	57
<i>h. Kesimpulan</i>	58
7 Profil Orang Miskin di Jakarta	59
7.1 Karakteristik Sosial Demografi	59
7.2 Karakteristik Pendidikan	60
7.3 Karakteristik Ketenagakerjaan	63
7.4 Karakteristik Tempat Tinggal (Perumahan)	66
LAMPIRAN	74

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1. Gini Ratio di Provinsi DKI Jakarta, 2017-2020	34
Tabel 5.1. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2) di Jakarta, Maret 2017-September 2020	41
Tabel 5.2. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) Menurut Kabupaten/Kota di DKI Jakarta, 2017-2020	44
Tabel 5.3. Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2) Menurut Kabupaten/Kota di DKI Jakarta, 2017-2020	46
Tabel 6.1. <i>KMO and Bartlett's Test</i>	49
Tabel 6.2. <i>Anti-Image Matrices</i>	51
Tabel 6.3. <i>Communalities</i>	52
Tabel 6.4 <i>Total Variance Explained</i>	54
Tabel 6.5. <i>Tabel Component Matrix</i>	57
Tabel 7.1.1. Karakteristik Demografi Rumah Tangga menurut Rumah Tangga Miskin dan Tidak Miskin (%), 2019-2020	60
Tabel 7.2.1. Kemampuan Membaca dan Menulis Kepala Rumah Tangga menurut Rumah Tangga Miskin dan Tidak Miskin, 2019-2020	61

Tabel 7.2.2. Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Kepala Rumah Tangga menurut Rumah Tangga Miskin dan Tidak Miskin, 2019-2020	62
Tabel 7.3.1. Sumber Penghasilan Utama Kepala Rumah Tangga menurut Rumah Tangga Miskin dan Tidak Miskin (%), 2019-2020.....	64
Tabel 7.3.2. Status Pekerjaan Kepala Rumah Tangga menurut Rumah Tangga Miskin dan Tidak Miskin (%), 2019-2020	65
Tabel 7.4.1. Luas Lantai per Kapita menurut Rumah Tangga Miskin dan Rumah Tangga Tidak Miskin (%), 2019-2020	67
Tabel 7.4.2. Jenis Atap Terluas menurut Rumah Tangga Miskin dan Rumah Tangga Tidak Miskin (%), 2019-2020	68
Tabel 7.4.3. Jenis Dinding Terluas menurut Rumah Tangga Miskin dan Tidak Miskin (%), 2019-2020..	69
Tabel 7.4.4. Sumber Air Minum Rumah Tangga menurut Rumah Tangga Miskin dan Rumah Tangga Tidak Miskin (%), 2019-2020	70

Tabel 7.4.5. Jenis Jamban Rumah Tangga menurut Rumah Tangga Miskin dan Rumah Tangga Tidak Miskin (%), 2019-2020	71
Tabel 7.4.6. Status Kepemilikan Rumah menurut Rumah Tangga Miskin dan Rumah Tangga Tidak Miskin (%), 2019-2020	73

<https://jakarta.bps.go.id>

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1. Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin DKI Jakarta, 2000-2020.....	23
Gambar 3.2. Miskin dan Persentase Penduduk Miskin di DKI Jakarta, 2010-2020 (Maret).....	25
Gambar 3.3. Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Penduduk Miskin di Pro vinsi DKI Jakarta, 2017-2020	26
Gambar 3.4. Perkembangan Garis Kemiskinan Provinsi DKI Jakarta, 2017-2020	27
Gambar 3.5. Perkembangan GK, GKM, dan GKNM Provinsi DKI Jakarta, 2017-2020	28
Gambar 3.6. Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota, 2020 (dalam ribuan)	30
Gambar 3.7. Perkembangan Kemiskinan Kab/Kota, 2020	31
Gambar 4.1.Gini Ratio DKI Jakarta dan Nasional, 2017-2020	33
Gambar 4.2 Persentase Pendapatan Kelompok Penduduk, Maret 2017 - September 2020	36

Gambar 5.1 Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2) di DKI Jakarta, Maret 2017 - September 2020.....	42
Gambar 6.1 <i>Scree Plot</i>	55

<https://jakarta.bps.go.id>

1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menemukan makna kemiskinan tidaklah mudah. Kemiskinan sebagai fenomena sosial akan berbeda dengan kemiskinan sebagai fenomena ekonomi. Kemiskinan sosial (budaya) lebih berkaitan dengan sikap terhadap kehidupan masyarakat miskin yang tidak memiliki keinginan untuk memajukan dan meningkatkan taraf hidupnya. Kemiskinan ekonomi merupakan gejala yang terjadi di sekitar masyarakat miskin dan umumnya dikaitkan dengan masalah pendapatan. Tipe kemiskinan inilah yang akan dikaji lebih jauh dalam publikasi ini.

Kemiskinan merupakan masalah klasik yang terus berulang di negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Meskipun sudah banyak program pengentasan kemiskinan, masalah ini belum juga terpecahkan. Kesulitan dalam memecahkan masalah ini adalah bahwa permasalahan terkait orang miskin sangat kompleks.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) pada goal ke-1 adalah mengakhiri

kemiskinan dalam segala bentuk dan dimensinya dan memberantas kemiskinan ekstrem pada tahun 2030. Ini adalah tantangan terbesar dunia dan prasyarat yang sangat diperlukan untuk pembangunan berkelanjutan. Pada tahun 2030, mengurangi proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari segala usia yang hidup dalam kemiskinan setidaknya setengahnya dan memperkenalkan sistem perlindungan sosial nasional yang berlaku untuk semua, termasuk yang miskin dan yang lemah.

Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan sosial masyarakat miskin dan rentan merupakan salah satu agenda utama pemerintah dalam rangka penanggulangan kemiskinan. Hal itu tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Pelaksanaan agenda tersebut membutuhkan partisipasi berbagai kelompok kepentingan, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun perusahaan (swasta).

Salah satu penyebab kemiskinan yang jarang dibicarakan adalah bencana atau wabah penyakit. Wabah virus corona yang lebih dikenal dengan pandemi Covid19 telah mengguncang dunia sejak akhir tahun 2019. Pandemi ini

menyebarkan ke seluruh dunia hingga wilayah geografis yang luas. Pada awal Maret 2020, Covid19 masuk ke Indonesia dengan jumlah infeksi yang semakin meningkat dan wilayah persebaran yang semakin luas, sehingga dinyatakan sebagai bencana tidak alam nasional.

Penerapan berbagai upaya untuk menahan penyebaran atau upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19 mengakibatkan banyak kegiatan ekonomi mengalami penurunan bahkan terhentinya produksi. Hal ini menyebabkan peningkatan pengangguran, penurunan tingkat produktivitas masyarakat dan perusahaan, serta mendorong munculnya penduduk miskin baru, yang meningkatkan jumlah penduduk miskin (Izzati 2020; Suryahadi et al. 2020). Dalam hal ini, pemerintah harus berupaya untuk mengurangi kemiskinan dalam jangka pendek, menengah dan panjang (Yusuf 2020).

Data kemiskinan yang baik dapat digunakan untuk memotret wajah kemiskinan dan membantu para pengambil keputusan untuk menentukan langkah yang tepat didalam menanggulangi masalah kemiskinan.

1.2. Tujuan Penulisan

Tujuan Penulisan publikasi ini antara lain untuk:

- a. Mengetahui jumlah dan persentase penduduk miskin di Provinsi DKI Jakarta tahun 2020;
- b. Mengetahui perbandingan karakteristik penduduk miskin di Provinsi DKI Jakarta tahun 2019 dan 2020 (kondisi sebelum dan sesudah pandemi covid-19);
- c. Mengetahui distribusi dan ketimpangan pendapatan di Provinsi DKI Jakarta tahun 2020.

1.3. Ruang Lingkup dan Data yang Digunakan

Ruang lingkup analisis mencakup tingkat kemiskinan secara regional di Provinsi DKI Jakarta tahun 2020. Karakteristik penduduk miskin dan tidak miskin, distribusi dan ketimpangan pendapatan penduduk dan beberapa indikator kemiskinan lainnya juga disajikan dengan menggunakan data Susenas Modul Konsumsi dan Kor pada Maret 2020.

1.4. Sistematika Penulisan

- Bab I menjelaskan latar belakang penulisan, tujuan penulisan, ruang lingkup dan data yang digunakan serta sistematika penulisan.
- Bab II menjelaskan tentang berbagai penelitian atau metodologi yang pernah dibangun dan disajikan pada publikasi sebelumnya sekaligus diperkaya dengan hasil penelitian dan pengembangan metodologi terbaru yang sudah dipublikasikan.
- Bab III menjelaskan tentang kemiskinan di Jakarta, perkembangan tingkat kemiskinan, perkembangan indeks kedalaman dan indeks keparahan kemiskinan.
- Bab IV menjelaskan tentang perkembangan distribusi dan ketimpangan pendapatan di DKI Jakarta.
- Bab V menjelaskan tentang seberapa dalam kemiskinan di Jakarta.
- Bab VI menjelaskan tentang Profil Kemiskinan di Jakarta berdasarkan karakteristik sosial demografi, pendidikan, ketenagakerjaan, dan perumahan pada rumah tangga miskin di DKI Jakarta.

2 METODOLOGI

2.1. Metode Penghitungan Kemiskinan

a. Konsep

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

b. Sumber Data

Sumber data utama yang dipakai adalah data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Modul Konsumsi dan Kor yang dilaksanakan pada bulan Maret.

c. Metode

Metode yang digunakan adalah menghitung Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM), sebagai berikut:

$$GK = GKM + GKNM$$

Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang setara dengan 2.100 kilokalori perkapita per hari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll).

Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi (kelompok pengeluaran).

d. **Teknik Penghitungan Garis Kemiskinan**

Tahap pertama adalah menentukan penduduk referensi yaitu 20 persen penduduk yang berada di atas Garis Kemiskinan Sementara. Garis Kemiskinan Sementara yaitu Garis Kemiskinan periode lalu yang di-inflate dengan inflasi umum (IHK). Dari penduduk referensi ini kemudian dihitung GKM dan GKNM.

GKM adalah jumlah nilai pengeluaran dari 52 komoditi dasar makanan yang riil dikonsumsi penduduk referensi yang kemudian disetarakan dengan

2.100 kilokalori per kapita per hari. Penyetaraan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan dilakukan dengan menghitung harga rata-rata kalori dari ke-52 komoditi tersebut. Formula dasar dalam menghitung adalah:

$$GKM_{jp} = \sum_{k=1}^{52} P_{jkp} Q_{jkp} = \sum_{k=1}^{52} V_{jkp}$$

GKM_{jp} = Garis Kemiskinan Makanan daerah j (sebelum disetarakan menjadi 2.100 kilokalori) provinsi p.

P_{jkp} = Harga komoditi k di daerah j dan provinsi p.

Q_{jkp} = Rata-rata kuantitas komoditi k yang dikonsumsi di daerah j di provinsi p.

V_{jkp} = Nilai pengeluaran untuk konsumsi komoditi k di daerah j provinsi p.

j = Daerah (perkotaan atau pedesaan).

p = Provinsi ke-p.

Selanjutnya GKM_j tersebut disetarakan dengan 2.100 kilokalori dengan cara mengalikan 2100 terhadap harga implisit rata-rata kalori menurut daerah j dari penduduk referensi, sehingga:

$$\overline{HK}_{jp} = \frac{\sum_{k=1}^{52} V_{jkp}}{\sum_{k=1}^{52} K_{jkp}}$$

K_{jkp} = Kalori dari komoditi k di daerah j provinsi

\overline{HK}_{jp} = Harga rata-rata kalori di daerah j provinsi p

$$GKM_{jp} = \overline{HK}_{jp} \times 2100$$

GKM = Kebutuhan minimum makanan di daerah j, yaitu yang menghasilkan energi setara dengan 2.100 kilokalori/kapita/hari.

j = Daerah (perkotaan atau pedesaan).

p = Provinsi ke-p.

GKNM merupakan penjumlahan nilai kebutuhan minimum dari komoditi-komoditi non makanan terpilih yang meliputi perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Nilai kebutuhan minimum per komoditi/ sub kelompok non makanan dihitung dengan menggunakan suatu rasio pengeluaran komoditi/ sub kelompok non makanan terhadap total pengeluaran komoditi/ sub kelompok yang tercatat dalam data Susenas modul konsumsi. Rasio tersebut dihitung dari hasil SPDKP

2004, yang dilakukan untuk mengumpulkan data pengeluaran konsumsi rumah tangga per komoditi non makanan yang lebih rinci dibandingkan data Susenas modul konsumsi. Nilai kebutuhan minimum non makanan secara matematis dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$GKNM_{jp} = \sum_{k=1}^n r_{kj} V_{kjp}$$

$GKNM_{jp}$ = Pengeluaran minimum non makanan atau Garis Kemiskinan Non Makanan daerah j (kota/desa) dan provinsi p.

V_{kjp} = Nilai Pengeluaran per komoditi/ sub kelompok non makanan daerah j dan provinsi p.

r_{kj} = Rasio pengeluaran komoditi/ sub kelompok non makanan k menurut daerah (hasil SPDKP 2004) dan daerah j (kota + desa).

k = Jenis komoditi non makanan terpilih.

j = Daerah (perkotaan atau pedesaan).

p = Provinsi (perkotaan atau pedesaan).

Garis Kemiskinan merupakan Penjumlahan dari GKM dan GKNM. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin (PM). Persentase penduduk miskin di suatu provinsi dihitung dengan:

$$\%PM_p = \frac{PM_p}{P_p}$$

$\%PM_p$ = Persentase penduduk miskin di provinsi p.

PM_p = Jumlah Penduduk Miskin di provinsi p.

P_p = Jumlah Penduduk di provinsi p.

2.2. Indikator Kemiskinan

Berdasarkan pendekatan kebutuhan dasar, ada 3 indikator kemiskinan yang digunakan, yaitu:

- Pertama, *Head Count Index* (HCI- P_0), yaitu persentase penduduk miskin yang berada di bawah Garis Kemiskinan (GK).
- Kedua, Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index*- P_1) yang merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin

jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan.

- Ketiga, Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index-P₂*) yang memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi pula ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.
- Foster-Greer-Thorbecke (1984) telah merumuskan suatu ukuran yang digunakan untuk mengukur tingkat kemiskinan yaitu:

$$P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^{\alpha}$$

α = 0,1,2

z = Garis Kemiskinan.

y_i = Rata-rata pengeluaran perkapita sebulan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan ($i=1,2,\dots,q$), $y_i < z$

q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.

n = Jumlah penduduk.

Jika $\alpha = 0$, diperoleh *Head Count Index* (P_0), jika $\alpha = 1$ diperoleh indeks kedalaman kemiskinan (P_1) dan jika $\alpha = 2$ disebut indeks keparahan kemiskinan (P_2).

2.3. Distribusi dan Ketimpangan Pendapatan

Pengukuran ketidakmerataan pendapatan sesungguhnya sudah dimulai jauh sebelum Simon Kuznets menyampaikan hipotesanya. Pareto (1897), setelah melakukan penelitian mengenai distribusi pendapatan di Eropa, mendapatkan bentuk kurvanya (untuk setiap negara) tidaklah mengikuti distribusi normal, tapi mengikuti perumusan sebagai berikut:

$$A = \frac{N}{X^b}$$

A : Jumlah penduduk yang mempunyai pendapatan lebih besar dari X.

N : Jumlah penduduk total.

B : parameter yang nilainya antara 1 dan 2.

Berdasarkan hasil tersebut, Pareto menyatakan bahwa akan selalu ditemui ketimpangan dalam setiap negara, dimana kelompok penduduk terkaya mendapatkan paling banyak dari

pendapatan nasional negaranya. Penemuannya ini kemudian disebut sebagai *Pareto Law*, yang menyatakan bahwa 20 persen kelompok terkaya menikmati 80 persen dari pendapatan nasional negaranya.

Distribusi pendapatan merupakan salah satu aspek kemiskinan yang perlu dilihat karena pada dasarnya merupakan ukuran kemiskinan relatif. Oleh karena data pendapatan sulit diperoleh, pengukuran distribusi pendapatan selama ini dilakukan dengan pendekatan melalui data pengeluaran. Dalam hal ini, analisis distribusi pendapatan dilakukan dengan menggunakan data total pengeluaran rumah tangga sebagai proksi pendapatan yang bersumber dari Susenas. Dalam analisis ini akan digunakan empat ukuran untuk merefleksikan ketimpangan pendapatan yaitu koefisien Gini (*Gini Ratio*), Ukuran Bank Dunia, Indeks Theil dan Indeks -L.

a. Koefisien Gini (*Gini Ratio*)

Koefisien Gini adalah salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Rumus koefisien gini adalah sebagai berikut:

$$GR = 1 - \sum_{i=1}^n fp_i (Fc_i + Fc_{i-1})$$

- GR = Koefisien Gini.
- fp_i = Frekuensi penduduk dalam kelas pengeluaran ke-i.
- fc_i = Frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke-i.
- Fc_{i-1} = Frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke (i-1).

Nilai indeks Gini ada diantara 0 dan 1. Semakin tinggi nilai indeks Gini menunjukkan ketidakmerataan pendataan yang semakin tinggi. Jika nilai indeks Gini adalah nol, maka artinya terdapat pemerataan sempurna pada distribusi pendapatan, sedangkan jika bernilai satu berarti terjadi ketidakmerataan yang sempurna. Untuk publikasi resmi Indonesia oleh BPS, baik ukuran ketidakmerataan pendapatan versi Bank Dunia maupun indeks Gini, penghitungannya menggunakan data pengeluaran.

Koefisien Gini didasarkan pada kurva Loenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variabel tertentu (misalnya pendapatan)

dengan distribusi uniform yang mewakili persentase kumulatif penduduk (dari termiskin hingga terkaya) digambar pada sumbu horisontal dan persentase kumulatif pengeluaran (pendapatan) digambar pada sumbu vertikal. Ini menghasilkan kurva lorenz seperti yang ditunjukkan pada Gambar 3.1. garis diagonal mewakili pemetaan sempurna. Koefisien Gini didefinisikan sebagai $A/(A+B)$, dimana A dan B seperti yang ditunjukkan pada grafik. Jika $A=0$ koefisien gini bernilai 0 yang berarti pemetaan sempurna, sedangkan jika $B=0$ koefisien gini bernilai 1 yang berarti ketimpangan sempurna. Namun pengukuran dengan menggunakan Koefisien Gini tidak sepenuhnya memuaskan.

Daimon dan Thorbecke (1999:5) berpendapat bahwa penurunan ketimpangan (perbaikan distribusi pendapatan) selalu tidak konsisten dengan bertambahnya insiden kemiskinan kecuali jika terdapat dua aspek yang mendasari inkonsistensi tersebut.

- Pertama, variasi distribusi pendapatan dari kelas terendah meningkat secara drastis sebagai akibat krisis
- Kedua, merupakan persoalan metodologi berkaitan dengan keraguan dalam pengukuran kemiskinan dan indikator ketimpangan.

Beberapa kriteria bagi sebuah ukuran ketimpangan yang baik misalnya:

- Tidak tergantung pada nilai rata - rata (*mean independence*). Ini berarti bahwa jika semua pendapatan bertambah dua kali lipat, ukuran ketimpangan tidak akan berubah. Koefisien Gini memenuhi syarat ini.
- Tidak tergantung pada jumlah penduduk (*population size independence*). Jika penduduk berubah, ukuran ketimpangan seharusnya tidak berubah, jika kondisi lain tetap (*ceteris paribus*). Koefisien Gini juga memenuhi syarat ini.
- Simetris. Jika antar penduduk bertukar tempat tingkat pendapatannya, seharusnya tidak akan ada perubahan dalam ukuran ketimpangan. Koefisien Gini juga memenuhi hal ini.
- Sensitivitas Transfer Pigou-Dalton. Dalam kriteria ini, transfer pendapatan dari si kaya ke si miskin akan menurunkan ketimpangan. Gini juga memenuhi kriteria ini.

Ukuran ketimpangan yang baik juga diharapkan mempunyai sifat:

- Dapat didekomposisi

Hal ini berarti bahwa ketimpangan mungkin dapat didekomposisi (dipecah) menurut kelompok penduduk atau sumber pendapatan atau dalam dimensi lain. Indeks Gini tidak dapat didekomposisi atau tidak bersifat aditif antar kelompok. Yakni nilai total koefisien Gini dari suatu masyarakat tidak sama dengan jumlah nilai indeks Gini dari sub kelompok masyarakat (sub group).

- Dapat diuji secara statistik
Seseorang harus dapat menguji signifikansi perubahan indeks antar waktu. Hal ini sebelumnya menjadi masalah, tetapi dengan teknik *bootstrap* interval (selang) kepercayaan umumnya dapat dibentuk.

b. Ukuran Bank Dunia

Bank Dunia, dalam upaya mengukur ketimpangan pendapatan, membagi penduduk menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok 40 persen penduduk berpendapatan rendah, 40 persen penduduk berpendapatan menengah dan 20 persen penduduk berpendapatan tinggi. Ketimpangan pendapatan ditentukan berdasarkan besarnya jumlah pendapatan yang

diterima oleh kelompok 40 persen penduduk berpendapatan rendah, dengan kriteria sebagai berikut:

- Bila persentase pendapatan yang diterima oleh kelompok 40 persen penduduk berpendapatan rendah lebih kecil dari 12 persen, maka dikatakan terdapat ketimpangan pendapatan tinggi.
- Bila persentase pendapatan yang diterima oleh kelompok 40 persen penduduk berpendapatan rendah antara 12 sampai dengan 17 persen, maka dikatakan terdapat ketimpangan pendapatan moderat/ sedang/ menengah.
- Bila persentase pendapatan yang diterima oleh kelompok 40 persen penduduk berpendapatan rendah lebih besar dari 17 persen, maka dikatakan terdapat ketimpangan pendapatan rendah.

c. Indeks Theil dan Indeks- L

Ada sejumlah ukuran ketimpangan yang memenuhi semua kriteria bagi sebuah ukuran ketimpangan yang baik (di atas). Diantaranya yang paling banyak digunakan adalah Indeks Theil dan Indeks-L (ukuran deviasi log rata-rata). Kedua ukuran tersebut masuk dalam famli ukuran

ketimpangan “generalized entrophy”. Ukuran tersebut secara umum ditulis sebagai berikut:

$$GE(\alpha) = \frac{1}{\alpha(\alpha-1)} \left[\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left(\frac{y_i}{\bar{y}} \right)^\alpha - 1 \right]$$

Dimana \bar{y} adalah rata-rata pendapatan (pengeluaran).

Nilai GE bervariasi antara 0 dan ∞ dengan 0 mewakili distribusi yang merata dan nilai yang lebih tinggi mewakili tingkat ketimpangan yang lebih tinggi. Parameter α dalam kelompok ukuran GE mewakili penimbang yang diberikan pada jarak antara pendapatan pada bagian yang berbeda dari distribusi pendapatan. Untuk nilai α yang lebih rendah, GE lebih sensitif terhadap perubahan pada ekor bawah dari distribusi (penduduk miskin), dan untuk nilai α yang lebih tinggi GE lebih sensitif terhadap perubahan yang berakibat pada ekor atas distribusi (penduduk kaya). Nilai α yang paling umum digunakan adalah 0 dan 1.

- GE(1) disebut sebagai Indeks Theil, yang dapat ditulis sebagai berikut:

$$GE(1) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left(\frac{y_i}{\bar{y}} \right) \ln \left(\frac{\bar{y}}{y_i} \right),$$

- GE (0) juga dikenal dengan indeks-L, disebut ukuran deviasi log rata-rata (*mean log deviation*) karena ukuran tersebut memberikan standar deviasi dari log (y):

$$GE(0) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \ln \left(\frac{\bar{y}}{y_i} \right)$$

<https://jakarta.bps.go.id>

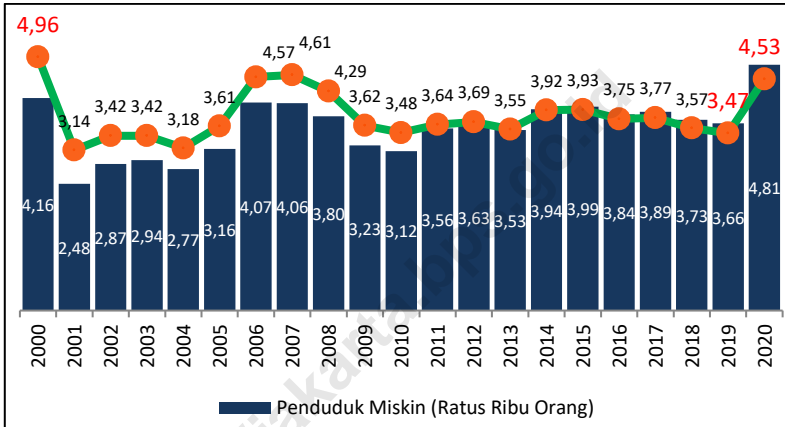
3 KEMISKINAN DI JAKARTA

3.1. Pandemi Covid-19 dan Tingkat Kemiskinan DKI Jakarta

Salah satu penyebab kemiskinan yang tidak sering dibahas adalah bencana atau wabah penyakit. Wabah virus corona yang lebih dikenal dengan pandemi Covid-19 telah mengguncang dunia sejak akhir tahun 2019. Pandemi ini menyebar secara global meliputi area geografis yang luas. Pada awal Maret 2020, Covid-19 masuk ke Indonesia dengan jumlah terinfeksi yang terus meningkat dan wilayah sebaran yang semakin meluas, sehingga dinyatakan sebagai bencana nasional non alam.

Persentase penduduk miskin periode Maret 2010 sampai Maret 2019 baik untuk nasional maupun DKI Jakarta menunjukkan kecenderungan menurun. Sejak tahun 2000, angka kemiskinan secara konsisten sudah melandai dari 4,96 persen di tahun 2000 menjadi 3,47 persen di tahun 2020.

Gambar 3.1.
Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin
DKI Jakarta, 2000-2020



Sumber: Susenas 2000 – 2020 (kondisi Maret)

Pandemi Covid-19 telah merubah banyak hal salah satunya adalah bertambahnya jumlah penduduk miskin secara drastis. DKI Jakarta merupakan salah satu provinsi yang terdampak besar akibat pandemi covid-19 ini. Menarik untuk dikaji lebih mendalam terkait profil dan karakteristik orang miskin seperti apa yang mendiami Jakarta serta faktor apa saja yang diduga menyebabkan hal ini masih saja terjadi.

Keberhasilan upaya penanggulangan kemiskinan yang selama ini sudah dicapai oleh Pemprov DKI Jakarta seolah menemui jalan buntu. Angka kemiskinan Jakarta yang sudah

turun 3,47 persen terendah sejak 19 tahun penghitungan angka kemiskinan, di awal Pandemi Covid-19 naik signifikan sebesar 1,14 persen menjadi 4,53 persen di tahun 2020. Angka ini menyamai angka kemiskinan Jakarta kondisi 20 tahun lalu. Kemiskinan telah meluluhlantakkan semua capaian kerja penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh Pemerintah dan stakeholder terkait.

3.2. Perkembangan Tingkat Kemiskinan, 2010-2020

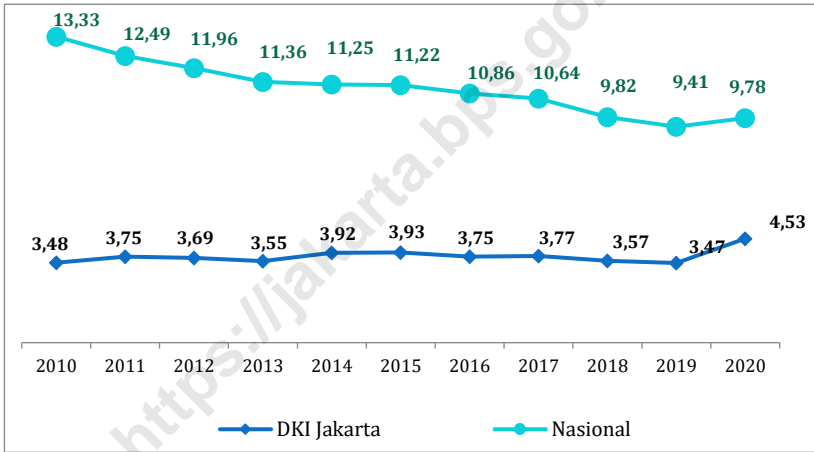
Keberadaan Jakarta sebagai episentrum penyebaran Covid-19, membuat Jakarta boleh dikatakan yang terdampak paling berat. Jakarta yang selama ini mengandalkan sektor ekonomi dan jasa, merasakan dampak yang luar biasa dari *tsunami Covid-19* ini.

Jika dibandingkan dengan angka kemiskinan nasional, tingkat kemiskinan di DKI Jakarta masih jauh dibawah angka kemiskinan nasional yang baru mencapai *single digit* di tahun 2018. Perkembangan tingkat kemiskinan di DKI Jakarta relatif lebih stagnan jika dibandingkan dengan nasional dengan kisaran 3-4 persen.

Secara umum, tingkat kemiskinan di DKI Jakarta masih jauh dibawah angka kemiskinan nasional. Angka kemiskinan

nasional baru mencapai mencapai *single digit* pada tahun 2018, namun DKI Jakarta bahkan sudah mencapainya sejak pertama kali dihitung tahun 2000.

Gambar 3.2
Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Penduduk Miskin di DKI Jakarta, 2010 – 2020 (Maret)

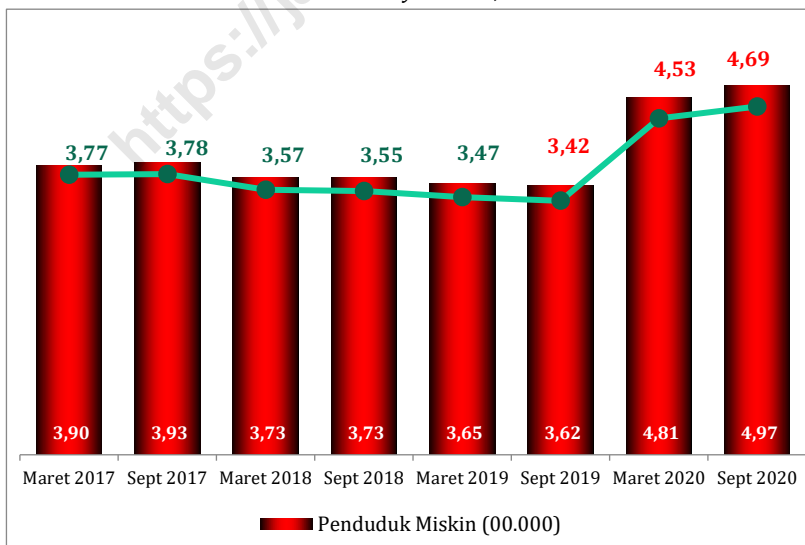


Sumber: Susenas 2010 – 2020 (kondisi Maret)

Perkembangan tingkat kemiskinan di DKI Jakarta relatif lebih stagnan jika dibandingkan dengan nasional dengan kisaran 3-4 persen. Menarik untuk dikaji lebih mendalam terkait profil dan karakteristik orang miskin seperti apa yang mendiami Jakarta serta faktor apa saja yang diduga menyebabkan hal ini masih saja terjadi.

Persentase penduduk miskin di DKI Jakarta pada bulan September 2020 mencapai 4,69 persen atau sekitar 497 ribu orang. Dibandingkan dengan September 2019 (3,42 persen atau 362 ribu orang), persentase penduduk miskin naik 1,27 persen poin atau bertambah 135 ribu orang. Sementara jika dibandingkan kondisi Maret 2020 (4,53 persen atau 481 ribu orang), persentase penduduk miskin naik sebesar 0,16 persen poin atau bertambah 16 ribu orang.

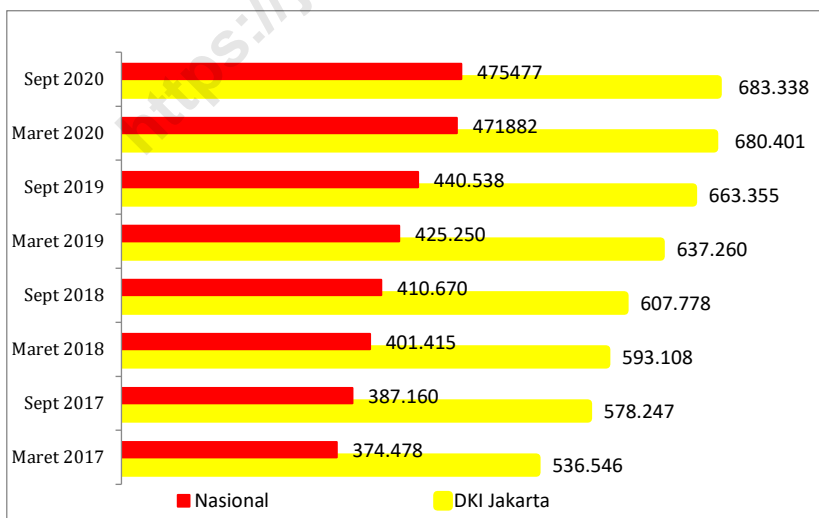
Gambar 3.3.
Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Penduduk Miskin di Pro vinsi DKI Jakarta, 2017-2020



Sumber: Susenas Maret 2017 - September 2020

Jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh besarnya Garis Kemiskinan (GK), karena penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Garis Kemiskinan dibentuk dari komponen Makanan dan Non Makanan, yang kemudian disebut Garis Kemiskinan Makanan untuk komponen Makanan, dan Garis Kemiskinan Non Makanan untuk komponen Non Makanan.

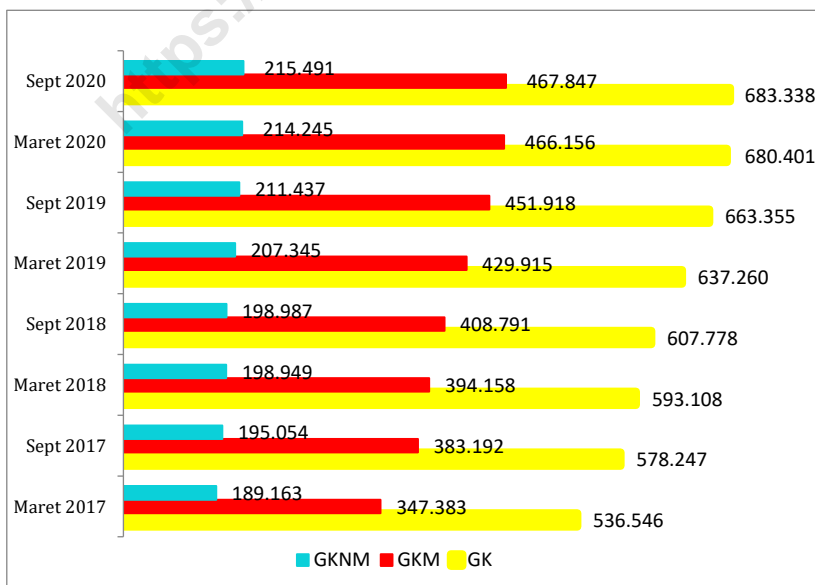
Gambar 3.4.
Perkembangan Garis Kemiskinan Provinsi DKI Jakarta,
2017-2020



Sumber: Susenas Maret 2017 - September 2020

Selama September 2019 - Maret 2020 - September 2020, Garis Kemiskinan (GK) naik sejalan dengan adanya inflasi dan kondisi perekonomian terdampak Pandemi Covid-19. Pada periode September 2019 ke Maret 2020, GK naik 2,57 persen dari Rp 663.355 per kapita per bulan ke Rp 680.401 per kapita per bulan. Sementara pada periode Maret 2020 ke September 2020, GK naik tipis 0,43 persen dari Rp 680.401 per kapita per bulan ke RP 683.338 per kapita per bulan

Gambar 3.5
Perkembangan GK, GKM, dan GKNM Provinsi DKI Jakarta, 2017-2020



Sumber: Susenas Maret 2017 - September 2020

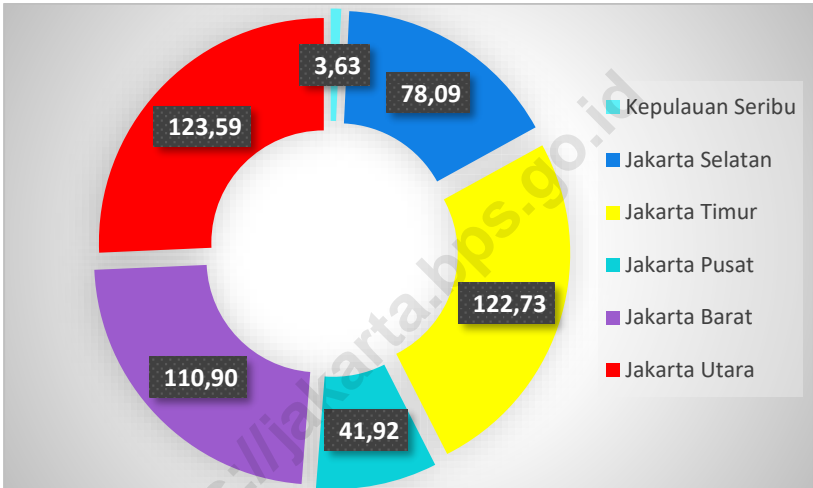
Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan disetarakan dengan 2.100 kkal per kapita per hari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dan lain-lain). Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar Non-Makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di perdesaan.

Kontribusi pengeluaran makanan (GKM) terhadap total keseluruhan pengeluaran konsumsi dalam membentuk Garis Kemiskinan (GK) cenderung lebih tinggi (kisaran 60 persen) dibandingkan kontribusi pengeluaran non makanan (GKMN).

3.3. Profil Kemiskinan Kabupaten/Kota 2020

Disparitas angka kemiskinan antar wilayah kabupaten/kota di Jakarta cukup tinggi. Terlebih jika dibandingkan angka kemiskinan antara wilayah daratan (kota) dan wilayah lautan (kabupaten).

Gambar 3.6
Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota, 2020
(dalam ribuan)

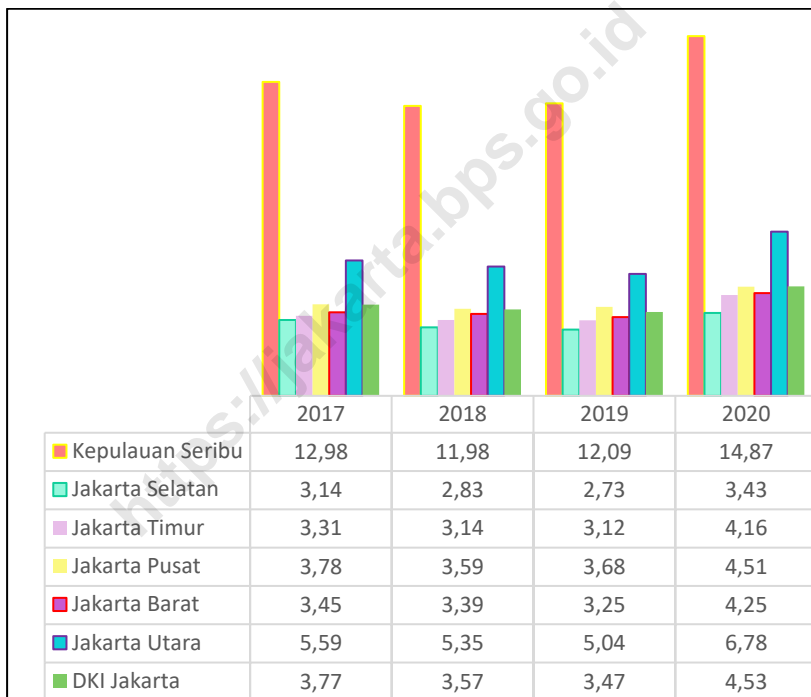


Sumber: Susenas Maret 2020

Angka kemiskinan di kabupaten Kepulauan Seribu masih 2 digit sampai dengan kondisi Maret 2020. Dua (2) wilayah yang angka kemiskinannya dibawah angka kemiskinan provinsi adalah kabupaten Kepulauan Seribu (14,87 persen) dan Kota Jakarta Utara (6,78 persen). Angka kemiskinan paling rendah berdasarkan hasil Susenas Maret 2020 adalah Jakarta Selatan (3,43 persen). Sementara untuk sebaran penduduk miskin, dari 480.860 orang penduduk miskin, terbanyak ada di Jakarta Utara (123.656 jiwa) dan

terendah ada di Kepulauan Seribu (3.632 jiwa). Selebihnya terdistribusi ke wilayah lain.

Gambar 3.7.
Perkembangan Kemiskinan Kab/Kota, 2020



Sumber: Susenas Maret 2020

4 DISTRIBUSI DAN KETIMPANGAN PENDAPATAN

Untuk melihat tingkat penyebaran pendapatan di antara setiap orang atau rumah tangga dalam masyarakat, dapat digunakan pendekatan melalui distribusi pendapatan. Pengukuran distribusi pendapatan menggunakan dua (2) konsep pokok, yaitu konsep ketimpangan absolut dan konsep ketimpangan relatif. Kemiskinan absolut adalah kondisi di mana tingkat pendapatan seorang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan. Kemiskinan relatif adalah perhitungan kemiskinan berdasarkan proporsi distribusi pendapatan daerah (Sukino, 2013).

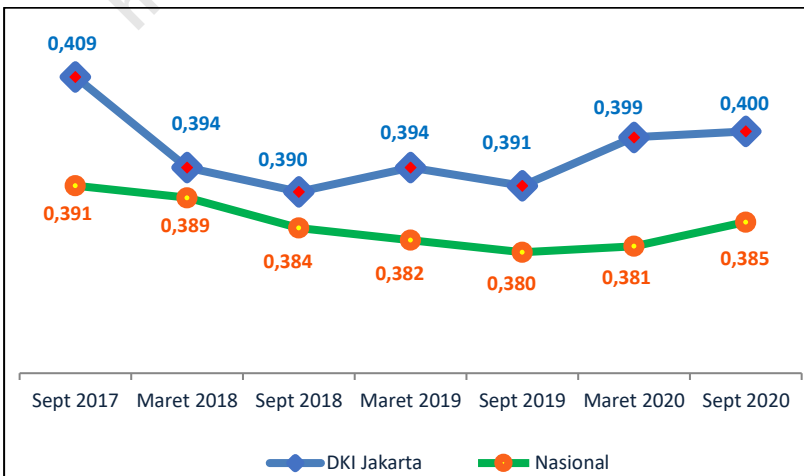
Distribusi pendapatan merupakan salah satu indikator pemerataan. Pada dasarnya, pemerataan akan terwujud jika proporsi pendapatan yang dikuasai oleh sekelompok masyarakat tertentu sama besarnya dengan proporsi kelompok tersebut. Alat yang lazim digunakan adalah Gini

Ratio dan cara perhitungan yang digunakan oleh Bank Dunia (Hasrimi, 2010).

4.1. Perkembangan Distribusi dan Ketimpangan Pendapatan

Gini rasio berada dalam rentang nilai 0 hingga 1, apabila semakin mendekati 1, artinya ketimpangannya semakin besar. Sedangkan nilai 0 menunjukkan ada pemerataan. Gini rasio merupakan indikator hasil perhitungan statistik yang menggambarkan ketimpangan kekayaan masyarakat.

Gambar 4.1.
Gini Ratio DKI Jakarta dan Nasional, 2017-2020



Sumber: Susenas September 2017-September 2020

Angka Gini Rasio mengindikasikan adanya perubahan distribusi pengeluaran penduduk. Gini Rasio juga digunakan untuk melihat apakah pemerataan pengeluaran penduduk semakin baik atau semakin buruk. Penurunan angka gini rasio pada periode 2017-2019 mengindikasikan bahwa distribusi pengeluaran penduduk pada periode tersebut semakin membaik, namun sejak Maret 2020 ketimpangan pendapatan semakin melebar yakni 0,399 (Maret 2020) dan 0,400 (September 2020) (Tabel 4.1).

Tabel 4.1.
Gini Ratio di Provinsi DKI Jakarta, 2017-2020

Periode	Gini Ratio
(1)	(2)
Maret 2017	0,413
September 2017	0,409
Maret 2018	0,394
September 2018	0,390
Maret 2019	0,394
September 2019	0,391
Maret 2020	0,399
September 2020	0,400

Sumber: Susenas Maret 2017 – September 2020

Secara umum angka Gini Rasio pada periode 2017-2019 di Jakarta cenderung melandai. Pada periode 2017-2019 terjadi penurunan dari 0,409 pada periode Maret 2017 menjadi 0,391 pada periode September 2019. Namun pada setelah Jakarta terdampak Pandemi Covid-19, angka Gini Ratio kembali naik menjadi 0,399 pada Maret 2020 dan 0,400 pada September 2020.

4.2. Kriteria Bank Dunia untuk Kemiskinan Jakarta

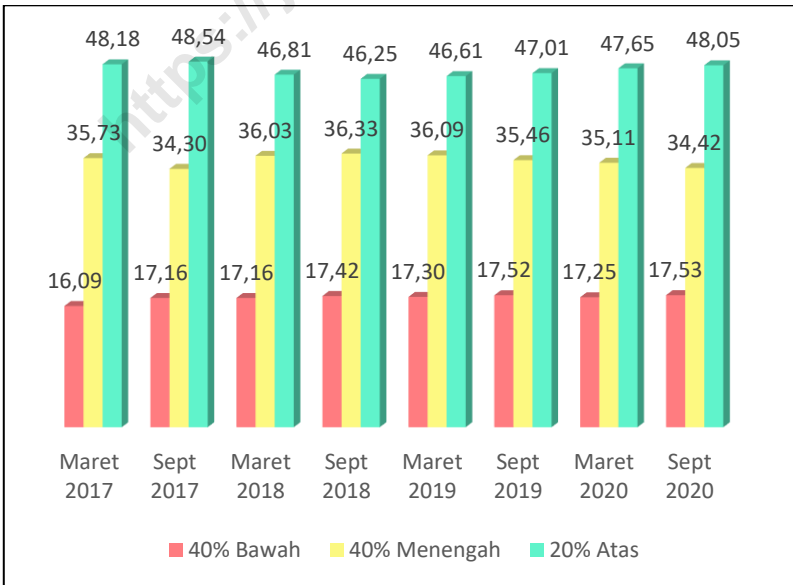
Selain Gini Ratio, ukuran ketimpangan lain yang sering digunakan adalah persentase pendapatan pada kelompok penduduk 40 persen terbawah atau yang dikenal dengan ukuran ketimpangan Bank Dunia. Kategori ketimpangan Bank Dunia ditentukan dengan menggunakan kriteria sebagai berikut:

- Jika proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk kurang dari 12 persen dikategorikan ketimpangan pendapatan tinggi.
- Jika proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total

pendapatan seluruh penduduk di antara 12-17 persen dikategorikan ketimpangan pendapatan sedang/menengah.

- Jika proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk lebih dari 17 persen dikategorikan ketimpangan pendapatan rendah.

Gambar 4.2
 Persentase Pendapatan Kelompok Penduduk,
 Maret 2017 – September 2020



Sumber: Susenas September 2017-September 2020

Berdasarkan hasil Susenas September 2020, persentase pendapatan pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 17,53 persen yang berarti pendapatan penduduk DKI Jakarta berada pada kategori ketimpangan rendah. Angka ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan kondisi Maret 2020 yaitu sebesar 17,25 persen.

<https://jakarta.bps.go.id>

5 SEBERAPA DALAM DAN PARAH KEMISKINAN DI JAKARTA?

Pemetaan kemiskinan makro bertujuan untuk menggambarkan keragaman kemiskinan di suatu daerah dengan mengkaji daerah mana yang lebih sejahtera dan mana yang kurang sejahtera. Terkadang wilayah dengan tingkat kemiskinan makroekonomi yang lebih rendah memiliki wilayah kemiskinan yang luas dan tidak tercermin dalam statistik kemiskinan makroekonomi.

Pemetaan kemiskinan makro dalam publikasi ini didasarkan pada Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1). Alasan kami menggunakan P1 adalah karena indeks ini adalah ukuran kesenjangan pengeluaran rata-rata untuk setiap orang miskin. P1 merupakan salah satu indikator ekonomi yang digunakan untuk mengukur kemiskinan secara makro. Semakin tinggi nilai indeks ini, semakin besar kesenjangan pengeluaran rata-rata untuk setiap orang miskin. Menurut Institut Bank Dunia pada tahun 2002, P1 adalah biaya pengentasan kemiskinan,

karena indikator ini menunjukkan berapa banyak uang yang dikirim kepada orang miskin untuk membawa pengeluaran orang miskin ke garis kemiskinan.

“Strategi kebutuhan dasar yang digunakan oleh BPS, dikutip oleh Thee Kian Wie (1981: 29), diterbitkan pada tahun 1976 oleh Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) dengan judul Kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi dan kebutuhan dasar: A. dipromosikan dan diresmikan masalah bagi sebuah dunia. Strategi kebutuhan inti berfokus pada pendekatan langsung dan tidak langsung, misalnya melalui trickle down effect dari pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Kesulitan umum dalam menentukan indikator kebutuhan dasar adalah standar atau kriteria subjektif, karena dipengaruhi oleh adat, budaya, daerah, dan kelompok sosial. Menentukan setiap kebutuhan pokok itu sulit karena dipengaruhi oleh jenis komponen itu sendiri, misalnya selera konsumen terhadap suatu jenis makanan atau barang lain” (BPS, 2008a).

Salah satu teori di balik data ini adalah teori perangkap kemiskinan Malthus. Teori Malthus menunjukkan bahwa suatu hari pertumbuhan penduduk akan melampaui persediaan makanan. Ketika situasi ini terjadi, jumlah

makanan dibatasi. Orang berpenghasilan rendah yang tidak makan akan menjadi miskin.

5.1. Perkembangan Indeks Kedalaman dan Kearifan Kemiskinan, 2017 - 2020

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar jumlah dan persentase penduduk miskin, dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan penanggulangan kemiskinan juga sekaligus harus dapat mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index- P₁*), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Sedangkan Indeks Kearifan Kemiskinan (*Poverty Severity Index-P₂*) memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin.

Tabel 5.1
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2) di Jakarta, Maret 2017-September 2020

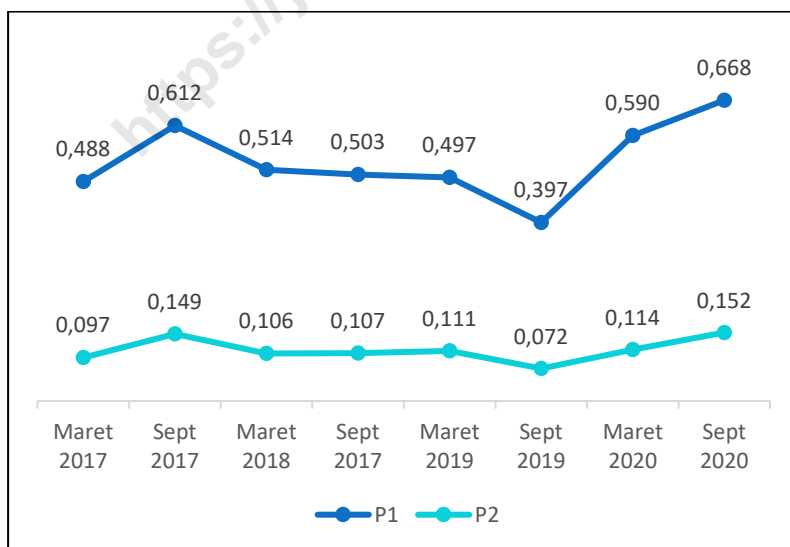
Periode	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1)	Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2)
(1)	(2)	(3)
Maret 2017	0,488	0,097
September 2017	0,612	0,149
Maret 2018	0,514	10,106
September 2018	0,503	0,107
Maret 2019	0,497	0,111
September 2019	0,397	0,072
Maret 2020	0,590	0,114
September 2020	0,669	0,152
Perubahan:		
Maret 2020 - Sept 2020	0,079	0,038
Sept 2019 - Sept 2020	0,272	0,080

Sumber: Susenas Maret 2017 – September 2020

Kondisi Pandemi Covid-19 juga memperparah angka Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2). Pada periode Maret 2020 - September 2020,

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2) menunjukkan peningkatan. Indeks Kedalaman Kemiskinan naik sebesar 0,079 poin dari 0,590 pada Maret 2020 menjadi 0,668 pada September 2020. Sementara itu Indeks Keparahan Kemiskinan juga naik sebesar 0,038 poin dari 0,114 pada Maret 2020 menjadi 0,152 pada September 2020.

Gambar 5.1
Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) dan
Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2) di DKI Jakarta,
Maret 2017 - September 2020



Sumber: Susenas Maret 2017-September 2020

Jika dibandingkan dengan kondisi September 2019, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2) juga mengalami peningkatan yang lebih besar. Indeks Kedalaman Kemiskinan naik sebesar 0,272 poin dari 0,397 pada bulan September 2019 menjadi 0,668 pada September 2020. Begitu juga dengan Indeks Keparahan kemiskinan naik sebesar 0,038 poin, yaitu dari 0,072 pada bulan September 2019 menjadi 0,152 pada September 2020.

5.2. Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten/Kota di Jakarta, Maret 2017 – Maret 2020

Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index- P_1*) tingkat kabupaten/kota hanya dapat disajikan berdasarkan hasil Susenas Maret. Indeks ini merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.

Tabel 5.2.
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Menurut
Kabupaten/Kota di DKI Jakarta,
2017-2020

Periode	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kep. Seribu	2,09	1,70	1,95	2,10
Jakarta Selatan	0,38	0,29	0,39	0,47
Jakarta Timur	0,46	0,36	0,33	0,35
Jakarta Pusat	0,33	0,77	0,33	0,60
Jakarta Barat	0,4	0,55	0,46	0,61
Jakarta Utara	0,83	0,83	0,63	0,99
DKI Jakarta	0,52	0,51	0,50	0,59

Sumber: Susenas Maret 2017 – Maret 2020

Pemetaan pada profil kemiskinan setiap kabupaten/kota di DKI Jakarta dilakukan untuk melihat di kabupaten/kota mana penduduk miskin terkonsentrasi. Pemetaan kemiskinan dengan menggunakan nilai P1 provinsi akan menghasilkan 2 kelompok wilayah, yaitu: kelompok kabupaten/kota yang mempunyai nilai P1 di atas nilai P1 provinsi dan kelompok provinsi yang mempunyai nilai P1 di bawah atau sama dengan nilai P1 provinsi.

Informasi pada Tabel 5.2 menunjukkan bahwa secara umum dari tahun 2017 sampai tahun 2019, Kabupaten Kepulauan Seribu cenderung mempunyai nilai indeks kedalaman kemiskinan (P1) lebih besar dibandingkan wilayah lainnya. Ini sejalan dengan angka besaran persentase penduduk miskin (P0) nya. Bahkan nilai P1 Kepulauan Seribu hampir selalu berada diatas rata-rata indeks provinsi.

5.3. Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten/Kota di Jakarta, Maret 2017-Maret 2020

Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index-P₂*) memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Secara umum, dari tabel 5.2 dapat dilihat bahwa tingkat keparahan kemiskinan di kabupaten/kota meningkat kecuali Jakarta Timur yang justru turun 0,03 poin dari 0,08 poin di tahun 2019 menjadi 0,05 poin di tahun 2020 dan Kepulauan seribu yang juga turun 0,04 poin dari 0,46 poin di tahun 2019 menjadi 0,42 poin di tahun 2020.

Tabel 5.3.
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Menurut
Kabupaten/Kota di DKI Jakarta, 2017-2020

Periode	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kep. Seribu	0,54	0,42	0,46	0,42
Jakarta Selatan	0,07	0,05	0,09	0,10
Jakarta Timur	0,10	0,06	0,08	0,05
Jakarta Pusat	0,06	0,25	0,05	0,15
Jakarta Barat	0,07	0,14	0,09	0,14
Jakarta Utara	0,19	0,18	0,14	0,21
DKI Jakarta	0,10	0,11	0,11	0,11

Sumber: Susenas Maret 2017 - Maret 2020

Tabel 5.3 juga menunjukkan dua (2) kota yang tingkat keparahan kemiskinannya lebih rendah daripada angka propinsi yakni Jakarta Timur (0,05) dan Jakarta Selatan (0,10). Artinya bahwa pengeluaran diantara penduduk miskin di kedua kota tersebut, cenderung tersebar secara merata, tidak terlalu ekstrim perbedaannya.

Pembahasan disini akan menggunakan analisis deskriptif dan Analisis Komponen Utama (AKU). Analisis deskriptif bertujuan untuk menggambarkan karakteristik penduduk miskin dengan menampilkan tabel dan gambar serta interpretasinya. Sementara Analisis Komponen Utama (AKU) digunakan untuk mereduksi variabel dan membentuk faktor utama serta melihat hubungan antara setiap faktor utama dengan P1.

6 FAKTOR-FAKTOR MAKRO KEMISKINAN DI JAKARTA

Faktor-faktor yang diduga berpengaruh terhadap kemiskinan diperoleh dengan cara mereduksi tiga (3) variabel yang telah diidentifikasi yakni Angka Pengangguran, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Pertumbuhan Ekonomi. Hipotesa yang digunakan dalam pengolahan ini adalah ketiga variabel di atas mempengaruhi besaran nilai P_0 di Jakarta.

Setelah dilakukan penilaian kelayakan variabel dengan cara menguji hipotesis yang menyatakan bahwa antar variabel asal tidak berkorelasi, langkah berikutnya adalah menguji tingkat kelayakan data untuk mengetahui apakah data dapat dilakukan proses analisis selanjutnya. Berikut hasil pengujian kelayakan apakah data dapat dianalisis lebih lanjut.

a. Nilai *KMO and Bartlett's Test*

Tabel KMO dan Bartlett's Test berguna untuk mengetahui kelayakan suatu variabel, apakah dapat dilanjutkan ke tahap

selanjutnya untuk melakukan analisis faktor atau tidak. Caranya dengan melihat nilai KMO MSA (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy). Jika nilai KMO MSA > 0,5, maka teknis analisis faktor dapat dilanjutkan.

Tabel 6.1. *KMO and Bartlett's Test*

KMO and Bartlett's Test		
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.		0,656
Bartlett's Test of Sphericity	Approx. Chi-Square	3,344
	df	3
	Sig.	0,342

Berdasarkan informasi pada Tabel 6.1, diketahui nilai *Measure of Sampling Adequacy* (MSA) sebesar 0,656 (lebih besar dari 0,50) yang menunjukkan bahwa data baik untuk dianalisis lebih lanjut dengan analisis komponen utama maupun analisis faktor. Selain pengecekan terhadap KMO and Bartlett test, dilakukan juga pengecekan *Anti Image Matrices* untuk mengetahui apakah variabel - variabel secara parsial layak untuk dianalisis dan tidak dikeluarkan dalam pengujian.

b. *Anti Image Matrices*

Anti-Image Matrices berguna untuk mengetahui variabel

mana saja yang layak untuk dipakai untuk analisis faktor. Pada bagian *anti-image correlation*, terdapat kode huruf (a) yang artinya tanda untuk *Measure of Sampling Adequacy* (MSA). Persyaratan yang harus dipenuhi dalam analisis faktor adalah nilai $MSA > 0,5$.

Nilai MSA dapat dilihat pada tabel *anti-image correlation*, nilai MSA ditunjukkan pada diagonal *anti-image correlation*. Nilai MSA ini berguna untuk mengetahui apakah sebuah variabel sudah memiliki kecukupan observasi, agar dapat dilanjutkan dengan Analisis Komponen Utama.

Berdasarkan hasil output SPSS, dari ketiga variabel yang diteliti mempunyai nilai $MSA > 0,50$. Nilai MSA untuk variabel pertumbuhan ekonomi adalah yang tertinggi yakni 0,757 dan lebih besar dari 0,50. Nilai MSA untuk variabel sehingga ketiga variabel tersebut dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut.

Tabel 6.2. *Anti-Image Matrices*

Anti-image Matrices

		Zscore: Pertumbuhan Ekonomi	Zscore: Angka Pengangguran	Zscore: Indeks Pembangunan Manusia
Anti-image Covariance	Zscore: Pertumbuhan Ekonomi	,742	-,096	-,209
	Zscore: Angka Pengangguran	-,096	,591	-,304
	Zscore: Indeks Pembangunan Manusia	-,209	-,304	,538
Anti-image Correlation	Zscore: Pertumbuhan Ekonomi	.757 ^a	-,145	-,331
	Zscore: Angka Pengangguran	-,145	.643 ^a	-,539
	Zscore: Indeks Pembangunan Manusia	-,331	-,539	.614 ^a

a. Measures of Sampling Adequacy (MSA)

c. Communalities

Tabel *Communalities* menunjukkan nilai variabel yang diteliti, apakah mampu untuk menjelaskan faktor atau tidak. Variabel dianggap mampu menjelaskan faktor jika nilai *extraction* lebih besar dari 0,50.

Dari keseluruhan nilai dalam table *communalities*, diperoleh bahwa ketiga variabel yang diujikan mempunyai nilai *communalities* yang besar (> 0.5). Hal ini dapat diartikan bahwa keseluruhan variabel yang digunakan memiliki hubungan yang kuat dengan faktor yang terbentuk. Dengan kata lain, semakin besar nilai dari *communalities* maka semakin baik analisis faktor, karena semakin besar karakteristik variabel asal yang dapat diwakili oleh faktor yang terbentuk.

Tabel 6.3. *Communalities*

Communalities		
	Initial	Extraction
Zscore: Pertumbuhan Ekonomi	1,000	,564
Zscore: Angka Pengangguran	1,000	,698
Zscore: Indeks Pembangunan Manusia	1,000	,763

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Keeratan hubungan variabel pertumbuhan ekonomi terhadap faktor yang terbentuk sebesar 0,564 artinya hubungan variabel pertumbuhan ekonomi terhadap faktor yang terbentuk cukup erat. Atau dapat juga dikatakan kontribusi

variabel pertumbuhan ekonomi terhadap faktor yang terbentuk sebesar 56,4 persen.

Kemudian, keeratan hubungan variabel pengangguran sebesar 0,698 artinya hubungan variabel pengangguran terhadap faktor yang terbentuk erat. Atau dapat juga dikatakan kontribusi variabel pengangguran terhadap faktor yang terbentuk sebesar 69,8 persen.

Sementara keeratan hubungan variabel Indeks Pembangunan Manusia, paling besar nilainya disini yakni 0,763 artinya hubungan variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap faktor yang terbentuk paling erat hubungannya. Atau dapat juga dikatakan kontribusi variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap faktor yang terbentuk sebesar 76,3 persen.

d. *Total Variance Explained*

Tabel *Total Variance Explained* menunjukkan besarnya persentase keragaman total yang mampu diterangkan oleh keragaman faktor - faktor yang terbentuk. Dalam tabel tersebut juga terdapat nilai *eigenvalue* dari tiap-tiap faktor yang terbentuk.

Tabel 6.4 *Total Variance Explained*

Total Variance Explained

Component	Initial Eigenvalues			Extraction Sums of Squared Loadings		
	Total	% of Variance	Cumulative %	Total	% of Variance	Cumulative %
1	2,025	67,496	67,496	2,025	67,496	67,496
2	,615	20,515	88,011			
3	,360	11,989	100,000			

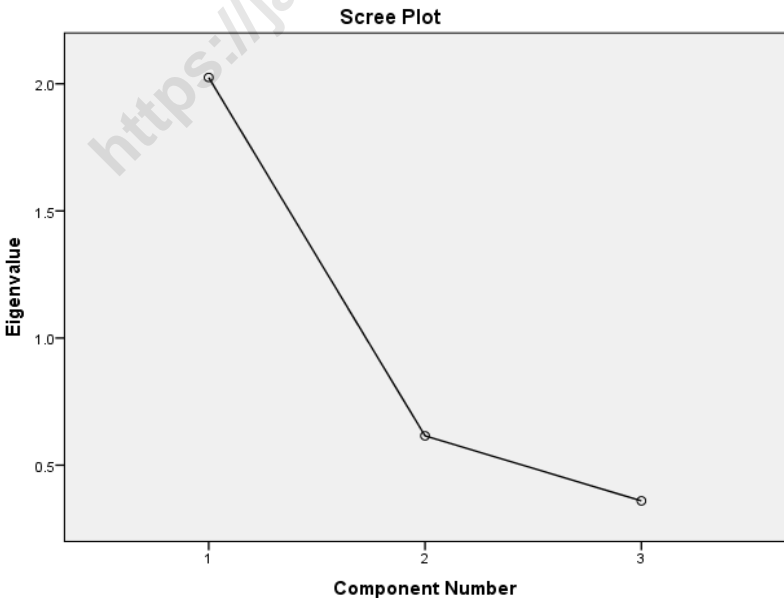
Extraction Method: Principal Component Analysis.

Untuk menentukan berapa komponen/faktor yang dipakai agar dapat menjelaskan keragaman total maka dilihat dari besar nilai *eigen value*-nya. Komponen dengan *eigenvalue* >1 adalah komponen yang dipakai. Berdasarkan tabel *Total Variance Explained* di atas, komponen 1 memiliki *eigenvalue* sebesar 2,025. Kolom 'cumulative %' menunjukkan persentase kumulatif varians yang dapat dijelaskan oleh faktor. Besarnya keragaman yang mampu diterangkan oleh Faktor 1 sebesar 67,496 persen yang artinya sudah cukup mewakili keragaman variable-variabel asal. Sementara 35,504 persennya sisanya merupakan variabel lain yang berada diluar kajian ini.

e. *Scree Plot*

Scree Plot adalah salah satu alternatif yang dapat digunakan untuk membantu peneliti menentukan berapa banyak faktor terbentuk yang dapat mewakili keragaman peubah – peubah asal. Bila kurva masih curam, akan nada petunjuk untuh menambahkan komponen. Bila kurva sudah landai, akan ada petunjuk untuk menghentikan penambahan komponen, walaupun penilaian curam/landai bersifat subjektif peneliti.

Gambar 6.1 *Scree Plot*



Dari *scree plot* di atas, terlihat pada saat satu komponen terbentuk, kurva masih menunjukkan kecuraman, di titik ke-2 garis kurva masih tajam namun sedikit berbeda dari pola kedua garis sebelumnya. Setelah melewati titik ke-2, garis kurva sudah mulai landai, semakin ke kanan akan semakin landai. Dari penjelasan di atas, dapat kita tarik kesimpulan bahwa hanya ada satu (1) komponen atau faktor yang terbentuk.

f. *Tabel Component Matrix*

Table *component matrix* menunjukkan besarnya korelasi tiap variabel dalam faktor yang terbentuk. Nilai-nilai koefisien korelasi antara variabel dengan faktor - faktor yang terbentuk (*loading factor*) dapat dilihat pada table *Component Matrix*. Faktor tersebut menghasilkan matrik *loading factor* yang nilai-nilainya merupakan koefisien korelasi antara variabel dengan faktor tersebut.

Rotasi *varimax* adalah rotasi orthogonal yang membuat jumlah varian faktor loading dalam masing-masing faktor akan menjadi maksimum, dimana nantinya peubah asal hanya akan mempunyai korelasi yang tinggi dan kuat dengan faktor tertentu saja (korelasinya mendekati 1) dan tentunya memiliki

korelasi yang lemah dengan faktor yang lainnya (korelasinya mendekati 0). Berdasarkan table diatas terlihat bahwa ketiga variable yang diuji berkorelasi kuat dengan faktor pembentuk kemiskinan di Jakarta tahun 2020.

Tabel 6.5. *Tabel Component Matrix*

Component Matrix^a

	Component
	1
Zscore: Pertumbuhan Ekonomi	0,751
Zscore: Angka Pengangguran	0,835
Zscore: Indeks Pembangunan Manusia	0,873

Extraction Method: Principal Component Analysis.

a. 1 components extracted.

g. *Rotated Component Matrix*

Setelah dilakukan rotasi faktor dengan metode varimax, diperoleh tabel **Rotated Component Matrix**. Terdapat perbedaan nilai korelasi variabel dengan setiap faktor sebelum dan sesudah dilakukan rotasi varimax. Karena Komponen yang terbentuk hanya 1, maka hasil matriks tidak dapat

dirotasi lagi. *Loading factor* yang dirotasi telah memberikan arti sebagaimana yang diharapkan dan setiap faktor sudah dapat diinterpretasikan dengan jelas. Terlihat pula bahwa setiap variabel hanya berkorelasi kuat satu (1) faktor saja (tidak ada variabel yang korelasinya $< 0,5$ di ketiga faktor).

h. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis faktor terbentuk satu faktor/komponen dominan yang mempengaruhi tingkat kemiskinan secara makro di Jakarta tahun 2020. Ketiga variabel yakni angka pengangguran, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan pertumbuhan ekonomi, secara Bersama-sama dan solid membentuk sebuah komponen yang cukup kuat dalam mempengaruhi angka kemiskinan di seluruh wilayah kabupaten/kota di Jakarta tahun 2020.

Besarnya keragaman yang dapat diterangkan secara Bersama-sama oleh ketiga variabel ini adalah 67,496 persen. Sementara sebesar 32,504 persennya perlu dikaji lebih lanjut karena tidak termasuk dalam cakupan penelitian ini.

7 PROFIL ORANG MISKIN JAKARTA

7.1. Karakteristik Sosial Demografi

Karakteristik sosial demografi yang disajikan dalam publikasi ini meliputi rata-rata jumlah anggota rumah tangga, persentase perempuan sebagai kepala rumah tangga, rata-rata usia kepala rumah tangga, dan tingkat pendidikan kepala rumah tangga. Karakteristik tersebut dibandingkan dengan melihat proporsi rumah tangga miskin dan tidak miskin.

Berdasarkan tabel 7.1.1 dapat dilihat bahwa baik tahun 2019 maupun tahun 2020, rumah tangga miskin cenderung memiliki anggota rumah tangga lebih banyak. Namun bila dibandingkan dengan kondisi tahun 2019, terjadi penurunan jumlah rata-rata anggota rumah tangga miskin dari rata-rata 5,26 anggota rumah tangga di tahun 2019 menjadi 4,89 anggota rumah tangga di tahun 2020. Pada rumah tangga miskin, rata-rata umur kepala rumah tangga (47,05 tahun) juga lebih tinggi dibandingkan dengan rumah tangga yang tidak miskin (46,73 tahun). Sementara untuk persentase rumah tangga miskin

yang dikepalai perempuan sebagai kepala rumah tangga (12,07 persen), cenderung lebih sedikit dibandingkan pada rumah tangga tidak miskin (17,17 persen). Dan jumlah ini sedikit meningkat dibandingkan dengan tahun 2019

Tabel 7.1.1
Karakteristik Demografi Rumah Tangga menurut Rumah Tangga Miskin dan Tidak Miskin (%), 2019-2020

Karakteristik Rumah Tangga	2019		2020	
	Miskin	Tidak Miskin	Miskin	Tidak Miskin
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Jumlah Anggota Rumah Tangga	5,26	3,36	4,89	3,41
Persentase Kepala Rumah Tangga Perempuan	9,83	19,31	12,07	17,17
Rata-Rata Umur Kepala Rumah Tangga	51	48	47,05	46,73

Sumber: Susenas Maret 2019 – Susenas Maret 2020

7.2 Karakteristik Pendidikan

Tingkat pendidikan juga berperan dalam mempengaruhi angka kemiskinan. Orang yang berpendidikan lebih rendah biasanya akan mempunyai peluang yang lebih tinggi untuk menjadi miskin. Kemampuan baca tulis dan pendidikan

terakhir yang ditamatkan menjadi indikator tingkat pendidikan yang dapat diamati pada rumah tangga miskin dan tidak miskin.

Tabel 7.2.1
Kemampuan Membaca dan Menulis Kepala Rumah Tangga menurut Rumah Tangga Miskin dan Tidak Miskin, 2019-2020

Kemampuan Baca Tulis	2019		2020	
	Miskin	Tidak Miskin	Miskin	Tidak Miskin
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Huruf Latin	100,00	99,92	97,90	99,48
Huruf Arab	55,30	65,28	47,83	58,71
Huruf Lainnya	14,06	12,92	3,57	8,39
Tidak dapat membaca/menulis	0,00	0,07	1,81	0,41

Sumber: Susenas Maret 2019 – Susenas Maret 2020

Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah dalam memberantas buta aksara telah membuahkan hasil yang baik di DKI Jakarta. Berdasarkan data Susenas DKI Jakarta kondisi bulan Maret 2019 dan Maret 2020, terlihat bahwa kemampuan baca dan tulis tidak begitu sensitif untuk membedakan rumah

tangga miskin atau bukan. Tabel 7.2.1 bahkan menunjukkan bahwa masih ada kepala rumah tangga yang buta huruf di DKI Jakarta baik pada rumah tangga miskin (1,81 persen) maupun pada rumah tangga tidak miskin (0,41 persen).

Tabel 7.2.2
Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Kepala Rumah
Tangga menurut Rumah Tangga Miskin dan Tidak Miskin,
2019-2020

Pendidikan	2019		2020	
	Miskin	Tidak Miskin	Miskin	Tidak Miskin
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tidak Tamat SD	0,38	3,40	10,31	5,06
SD	12,66	14,69	29,96	13,64
SLTP	20,98	15,15	24,64	16,97
SLTA	46,58	44,56	32,85	46,41
PT	19,40	21,88	2,24	17,91

Sumber: Susenas Maret 2019 – Susenas Maret 2020

Dari sisi pendidikan tertinggi yang ditamatkan, persentase kepala rumah tangga miskin yang berpendidikan

SMP kebawah lebih tinggi (64,91 persen) dibanding rumah tangga tidak miskin (35,67 persen). Bahkan pada rumah tangga miskin, masih ada 10,31 persen kepala rumah tangga yang tidak menamatkan SD sementara pada rumah tangga miskin hanya 5,06 persen saja Kepala Rumah tangga yang tidak tamat SD. Rendahnya tingkat Pendidikan kepala rumah tangga ini berdampak pada lapangan pekerjaan, pendapatan dan kesejahteraan rumah tangganya.

7.3 Karakteristik Ketenagakerjaan

Sumber penghasilan utama menjadi salah satu indikator tingkat kesejahteraan yang diharapkan dapat mencerminkan kondisi sosial ekonomi suatu rumah tangga. Tidak ada perbedaan pola karakteristik ketenagakerjaan yang dapat menggambarkan adanya perbedaan antara rumah tangga miskin dan tidak miskin adalah lapangan usaha atau sektor sumber penghasilan utama rumah tangga.

Dari tabel 7.3.1 dapat dilihat bahwa seperlima kepala rumah tangga miskin tidak bekerja. Kepala rumah tangga miskin yang berkerja, umumnya di sektor perdagangan besar dan eceran (18,32 persen) dan sektor pengangkutan dan

perdagangan (13,70 persen). Pola ini hampir sama dengan pada kepala rumah tangga tidak miskin.

Tabel 7.3.1
Sumber Penghasilan Utama Kepala Rumah Tangga menurut
Rumah Tangga Miskin dan Tidak Miskin (%), 2019-2020

Sumber Penghasilan Utama	2019		2020	
	Miskin	Tidak Miskin	Miskin	Tidak Miskin
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tidak bekerja	31,21	19,97	20,70	15,83
Industri Pengolahan	0,00	2,64	3,44	11,57
Perdagangan besar dan eceran	3,81	13,63	18,32	20,92
Pengangkutan dan Perdagangan	7,81	7,76	13,70	13,41
Aktivitas jasa lainnya	21,60	18,28		

Sumber: Susenas Maret 2019 – Susenas Maret 2020

Berdasarkan tabel 7.3.2 dapat dilihat bahwa baik pada rumah tangga miskin maupun rumah tangga tidak miskin, kepala rumah tangga yang bekerja umumnya berstatus buruh/karyawan/pegawai dan berusaha sendiri. Pada rumah tangga miskin, sebagian besar kepala rumah tangga yang

bekerja, statusnya buruh/karyawan/pegawai (68,56 persen). Pola yang sama juga terjadi pada rumah tangga tidak miskin (62,87 persen). Kepala rumah tangga miskin, paling sedikit berstatus berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar (0,07 persen). Sementara pada kepala rumah tangga tidak miskin, persentase terendah adalah status pekerja keluarga atau tidak dibayar.

Tabel 7.3.2
Status Pekerjaan Kepala Rumah Tangga menurut Rumah
Tangga Miskin dan Tidak Miskin (%), 2019-2020

Status Pekerjaan	2019		2020	
	Miskin	Tidak Miskin	Miskin	Tidak Miskin
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tidak bekerja	31,21	19,97	20,70	15,83
Berusaha sendiri dan berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar	20,62	24,31	30,32	32,74
Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar	0,06	3,03	0,07	3,71
Buruh/pegawai/karyawan dan pekerja bebas	44,12	48,09	68,56	62,87
Pekerja keluarga atau tidak dibayar	0,07	0,59	1,05	0,69

Sumber: Susenas Maret 2019 – Susenas Maret 2020

7.4. Karakteristik Tempat Tinggal (Perumahan)

Sudjana (1996) menyatakan rumah sebagai tempat tinggal beserta fasilitasnya harus memenuhi syarat-syarat yang layak untuk mendukung kehidupan dalam rangka pembangunan dari pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Pada kenyataannya untuk dapat mewujudkan rumah yang memenuhi syarat tersebut bukanlah hal yang mudah. Ketidakberdayaan dalam memenuhi kebutuhan rumah yang layak huni berbanding lurus dengan pendapatan dan pengetahuan tentang fungsi rumah itu sendiri. Indikator perumahan dapat menunjukkan tingkat kesejahteraan suatu rumah tangga antara lain luas lantai, dinding, sumber air, jamban, dan status kepemilikan rumah tempat tinggal.

Ada beberapa alasan untuk menganalisis rumah tangga miskin daripada penduduk atau individu miskin. Pertama, kemiskinan pada hakikatnya merupakan cermin keadaan ekonomi rumah tangga. Kedua, apabila ditemukan data rumah tangga miskin maka intervensi terhadap rumah tangga akan lebih efektif dibandingkan dengan intervensi kemiskinan terhadap individu yang cenderung mengarah pada

pandangan bahwa orang miskin memiliki karakteristik sebagai penyebab kemiskinannya

7.4.1 Luas Lantai

Keleluasaan pribadi (*privacy*) dalam tempat tinggal menjadi salah satu indikator perumahan yang menggambarkan tingkat kesejahteraan suatu rumah tangga. Keleluasaan pribadi tercermin dari luas lantai rumah perkapita (m²) Menurut Kementerian Kesehatan, salah satu syarat rumah dikatakan sehat adalah luas lantai rumah perkapitanya minimal 8 m² (BPS, 2001).

Tabel 7.4.1
Luas Lantai per Kapita menurut Rumah Tangga Miskin dan Rumah Tangga Tidak Miskin (%), 2019-2020

Luas Lantai per kapita (m ²)	2019		2020	
	Miskin	Tidak Miskin	Miskin	Tidak Miskin
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
≤ 8	72,28	33,59	75,53	31,70
8 < Luas lantai kapita ≤ 15	24,01	27,62	18,57	27,70
> 15	3,71	38,79	5,91	35,10

Sumber: Susenas Maret 2019 – Susenas Maret 2020

Rumah tangga miskin sebagian besar (75,53 persen) mendiami rumah tinggal dengan luas lantai per kapita kurang dari 8 m². Hal ini menunjukkan semakin sempitnya lahan di Jakarta yang digunakan untuk permukiman. Pesatnya pembangunan dan pemanfaatan lahan untuk kegiatan bisnis menggeser keberadaan permukiman dan membuat semakin sempitnya lahan hunian dan harga tanah yang semakin tinggi.

7.4.2 Jenis Atap

Jenis atap terluas rumah tangga miskin sebagian besar merupakan asbes, yaitu sebesar 79,84 persen. Untuk kategori yang sama pada rumah tangga tidak miskin, hanya 57,37 persen.

Tabel 7.4.2
Jenis Atap Terluas menurut Rumah Tangga Miskin dan Rumah Tangga Tidak Miskin (%), 2019-2020

Jenis Atap Terluas	2019		2020	
	Miskin	Tidak Miskin	Miskin	Tidak Miskin
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Genteng	18,02	36,69	14,90	34,89
Asbes	78,14	56,63	79,84	57,37
Lainnya	3,84	6,68	5,26	7,75

Sumber: Susenas Maret 2019 – Susenas Maret 2020

7.4.3 Jenis Dinding

Berdasarkan jenis dinding terluas, sebesar 93,11 persen rumah tangga miskin dinding rumahnya terbuat dari tembok. Namun, angka ini lebih rendah dibandingkan dengan rumah tangga tidak miskin yang mencapai 96,14 persen. Sementara rumah tangga miskin yang dindingnya dari kayu/papan masih ada sebesar 5,74 persen lebih tinggi jika dibandingkan dengan rumah tangga tidak miskin (3,05 persen).

Tabel 7.4.3
Jenis Dinding Terluas menurut Rumah Tangga Miskin dan Tidak Miskin (%), 2019-2020

Jenis Dinding Terluas	2019		2020	
	Miskin	Tidak Miskin	Miskin	Tidak Miskin
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tembok	88,26	95,64	93,11	96,14
Kayu/papan	10,15	3,72	5,74	3,05
Lainnya	1,59	0,64	1,15	0,81

Sumber: Susenas Maret 2019 – Susenas Maret 2020

7.4.4 Sumber Air Minum

Ketersediaan air bersih sebagai sumber air minum merupakan indikator perumahan yang mencirikan sehat tidaknya suatu rumah. Ketidaktersediaan air bersih juga menjadi salah satu indikasi kemiskinan.

Tabel 7.4.4
Sumber Air Minum Rumah Tangga menurut Rumah Tangga Miskin dan Rumah Tangga Tidak Miskin (%), 2019-2020

Sumber Air Minum	2019		2020	
	Miskin	Tidak Miskin	Miskin	Tidak Miskin
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Air kemasan bermerk	6,67	42,36	7,26	0,41
Air isi ulang	54,07	35,78	62,48	0,38
Leding	17,81	9,51	12,71	0,09
Sumur bor/pompa	20,24	11,82	16,93	0,12
Sumur terlindung	1,06	0,45	0,59	0,00
Mata air terlindung	0,00	0,02	0,00	0,00
Air hujan	0,13	0,02	0,00	0,00
Lainnya	0,02	0,06	0,03	0,00

Sumber: Susenas Maret 2019 – Susenas Maret 2020

Sebagian besar 62,48 persen rumah tangga miskin menggunakan air isi ulang dan hanya 7,26 persen yang mengkonsumsi air kemasan bermerk untuk memenuhi kebutuhan air minum. Penggunaan air isi ulang sebagai sumber air minum relatif besar jika dibandingkan dengan rumah tangga tidak miskin.

7.4.5 Jenis Jamban

Ketersediaan jamban menjadi salah satu fasilitas rumah sehat. Fasilitas jamban dibedakan atas jamban sendiri, jamban bersama/komunal, dan jamban umum/tidak ada.

Tabel 7.4.5
Jenis Jamban Rumah Tangga menurut Rumah Tangga Miskin dan Rumah Tangga Tidak Miskin (%), 2019-2020

Jenis Jamban (1)	2019		2020	
	Miskin (2)	Tidak Miskin (3)	Miskin (4)	Tidak Miskin (5)
Jamban Sendiri	70,93	83,31	72,44	84,82
Jamban bersama/komunal	24,23	13,90	18,93	12,22
Jamban Umum/Tidak ada	4,85	2,79	8,63	2,96

Sumber: Susenas Maret 2019 – Susenas Maret 2020

Secara umum, baik rumah tangga miskin (72,44 persen) maupun rumah tangga tidak miskin (82,82 persen) sudah memiliki jamban sendiri. Namun persentase penggunaan jamban bersama/komunal di rumah tangga miskin (18,93 persen) lebih tinggi dibandingkan pada rumah tangga tidak miskin (12,22 persen). Bahkan masih ada rumah tangga miskin yang menggunakan jamban umum karena tidak memiliki jamban yakni sebesar 8,63 persen. Artinya 8-9 diantara 100 rumah tangga miskin tidak memiliki jamban.

7.4.6 Status Kepemilikan Rumah Tempat Tinggal

Status pemilikan rumah tempat tinggal dibedakan menjadi rumah sendiri, kontrak/sewa, dan lainnya (rumah dinas, famili, bebas sewa, dan lain-lain). Persentase rumah tangga miskin yang menempati rumah sendiri di tahun 2020 sebesar 40,24 persen atau lebih rendah dibandingkan rumah tangga tidak miskin yang sebesar 45,20 persen dan kondisi tahun sebelumnya (40,55 persen). Sementara rumah tangga miskin yang tinggal di rumah dengan status kontrak/sewa adalah sebesar 34,04 persen dan yang menempati rumah dengan status lainnya sebesar 25,72 persen.

Tabel 7.4.6
 Status Kepemilikan Rumah menurut Rumah Tangga Miskin
 dan Rumah Tangga Tidak Miskin (%), 2019-2020

Status Kepemilikan Rumah	2019		2020	
	Miskin	Tidak Miskin	Miskin	Tidak Miskin
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Milik Sendiri	40,55	47,28	40,24	45,20
Kontrak/Sewa	27,03	36,58	34,04	37,83
Lainnya	32,42	16,14	25,72	16,97

Sumber: Susenas Maret 2019 – Susenas Maret 2020

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

<https://jakarta.kps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI DKI JAKARTA**

Jl. Salemba Tengah No. 36-38 Paseban
Senen Jakarta Pusat, 10440
Telepon: (021) 31928493; Fax: (021)3152004
Email: hps3100@bps.go.id; Website: jakarta.bps.go.id



9 772714 923005